

TATA KELOLA KELEMBAGAAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) DALAM MEMBANGUN OPINI PUBLIK PADA PILKADA 2024 DI KABUPATEN SUMBAWA

Buman

Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Penulis Korespondensi: ariaarifin1@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 31 Juni 2026 Accepted: 15 Agustus 2026 Published: 31 Agustus 2026	<i>This study aims to analyze the institutional governance of the Indonesian Journalists Association (PWI) of Sumbawa Regency in shaping public opinion during the 2024 Regional Head Election (Pilkada). The study is based on the increasing strategic role of the mass media in influencing public perception and the importance of journalistic ethics in maintaining the quality of democratic processes. This research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving the Chairman of PWI Sumbawa Regency, journalists, the owner of Liputan Sumbawa media, and a member of the General Election Commission (KPU) of Sumbawa Regency. The data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, while the institutional analysis referred to Scott's New Institutional Theory, which consists of regulatory, normative, and cultural-cognitive pillars. The findings reveal that PWI has implemented institutional governance through the enforcement of the Journalistic Code of Ethics, journalist development programs, and efforts to strengthen professionalism and independence. However, the implementation has not been fully optimal due to limitations in supervision, unequal internalization of professional values, and the influence of journalists' work culture. Among the three institutional pillars, the cultural-cognitive pillar has the strongest influence on journalistic practices because it shapes journalists' perspectives and routines in producing news. Therefore, strengthening institutional governance requires not only formal regulations but also continuous efforts to develop professional values and journalistic culture in order to support objective, balanced, and responsible public opinion during local democratic processes.</i>
Keywords Institutional Governance; Indonesian Journalists Association; Public Opinion; Regional Head Election.	

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan arah penyelenggaraan negara. Implementasi kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum sebagai mekanisme konstitusional untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada menjadi instrumen penting dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih kepala

daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya diukur dari terlaksananya seluruh tahapan pemilihan secara administratif, tetapi juga dari kualitas demokrasi yang tercermin melalui tingginya partisipasi masyarakat, terselenggaranya kompetisi politik yang sehat, serta tersedianya informasi publik yang akurat, objektif, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam proses tersebut, media massa memegang peranan yang sangat strategis sebagai salah satu pilar demokrasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan lembaga ekonomi. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa media tidak hanya bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, media menjadi instrumen penting dalam mendukung terwujudnya demokrasi yang sehat melalui penyebaran informasi yang berkualitas.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola penyebaran informasi politik di Indonesia. Informasi mengenai dinamika politik tidak lagi hanya diperoleh melalui media cetak dan penyiaran, tetapi juga melalui media daring dan media sosial yang mampu menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Perkembangan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, namun pada saat yang sama juga menghadirkan tantangan berupa meningkatnya penyebaran informasi yang belum terverifikasi, potensi bias pemberitaan, serta terbentuknya opini publik yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik maupun ekonomi. Kondisi tersebut menuntut media massa untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalistik sehingga informasi yang diterima masyarakat tetap objektif, akurat, dan berimbang.

Peran media menjadi semakin penting ketika berlangsung kontestasi politik, termasuk dalam penyelenggaraan Pilkada. Selama tahapan Pilkada, media menjadi saluran utama penyebaran informasi mengenai pasangan calon, visi dan misi, program kerja, hingga berbagai isu politik yang berkembang di tengah masyarakat. Informasi yang dipublikasikan media tidak hanya menambah pengetahuan masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk persepsi, sikap, dan opini publik terhadap para kandidat maupun proses demokrasi yang sedang berlangsung. Dengan demikian, independensi media dan profesionalisme wartawan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menjaga kualitas informasi sekaligus kualitas demokrasi.

Keberadaan media lokal di Kabupaten Sumbawa memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun arus informasi politik sekaligus membentuk opini publik selama penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024. Berbagai media lokal secara aktif memberitakan seluruh tahapan Pilkada, mulai dari penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, debat publik, hingga penetapan hasil pemilihan. Tingginya intensitas pemberitaan menunjukkan bahwa media lokal menjadi salah satu sumber informasi utama yang dijadikan rujukan oleh masyarakat dalam mengikuti perkembangan politik daerah. Kedekatan media lokal dengan kehidupan sosial masyarakat menjadikan informasi yang disampaikan lebih mudah diterima dan dipercaya, sehingga berpengaruh terhadap cara masyarakat memahami dinamika politik yang berlangsung.

Namun, meningkatnya intensitas pemberitaan juga menghadirkan tantangan terhadap kualitas informasi yang diterima masyarakat. Setiap media memiliki kebijakan redaksional, sudut pandang, dan cara penyajian berita yang berbeda sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan framing terhadap isu politik yang sama. Perbedaan

tersebut dapat terlihat melalui pemilihan isu, penggunaan bahasa, maupun penekanan terhadap peristiwa tertentu. Akibatnya, informasi politik yang diterima masyarakat tidak hanya merupakan cerminan fakta, tetapi juga hasil konstruksi media. Kondisi ini menunjukkan bahwa media tidak sekadar berfungsi sebagai penyampai informasi, melainkan juga memiliki kemampuan memengaruhi persepsi dan opini publik melalui proses seleksi serta penyajian berita.

Fenomena tersebut tercermin dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2024. Setelah Pilkada Serentak dilaksanakan, arus informasi politik di Kabupaten Sumbawa meningkat secara signifikan, baik melalui media massa maupun media social dalam mengkampanyekan kandidat yang terpilih. Namun munculnya isu informasi yang belum terverifikasi dan menimbulkan kesimpangsiuran di ruang public yang sempat menjadi perhatian masyarakat adalah beredarnya narasi mengenai dugaan surat suara yang telah tercoblos di TPS 06 Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Isu tersebut berkembang luas di media sosial sehingga memunculkan beragam opini publik dan mendorong Bawaslu untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

Narasi tersebut kemudian diklarifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai informasi yang tidak benar (hoaks). Perbedaan antara pemberitaan media yang mengacu pada proses klarifikasi resmi dan informasi yang beredar di media sosial menunjukkan pentingnya penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam setiap proses peliputan. Pemberitaan yang akurat, berimbang, dan terverifikasi menjadi faktor penting agar opini publik tidak terbentuk berdasarkan informasi yang belum pasti, melainkan berdasarkan fakta yang telah melalui proses verifikasi oleh lembaga yang berwenang.

Dalam konteks tersebut, besarnya pengaruh media dalam membentuk opini publik menempatkan wartawan sebagai aktor utama dalam produksi informasi politik. Wartawan dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip independensi, akurasi, keberimbangan, serta tanggung jawab sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tugas jurnalistik di tingkat lokal masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kedekatan sosial antara wartawan dengan aktor politik, kepentingan media, tekanan politik, serta tuntutan kecepatan penyampaian informasi yang berpotensi memengaruhi kualitas pemberitaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola kelembagaan organisasi PWI tidak hanya berkaitan dengan pembinaan wartawan melalui aturan formal, tetapi juga menyangkut bagaimana organisasi membangun profesionalisme, independensi, serta budaya jurnalistik yang berfokus pada kepentingan publik. Tata kelola kelembagaan yang efektif diharapkan mampu bahwa wartawan menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif Teori Kelembagaan Baru (*New Institutional Theory*) yang dikemukakan Scott, efektivitas suatu organisasi dipengaruhi oleh tiga pilar utama, yaitu regulatif, normatif, dan kultural-kognitif yang secara bersama-sama membentuk perilaku organisasi dan praktik para aktornya.

Meskipun demikian, kajian mengenai bagaimana PWI Kabupaten Sumbawa menjalankan tata kelola kelembagaannya dalam membina wartawan dan membangun opini publik selama Pilkada 2024 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tata kelola kelembagaan PWI Kabupaten Sumbawa dalam memastikan pemberitaan yang profesional, berimbang, dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, sehingga dapat mendukung terbentuknya opini publik yang objektif serta memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Menurut Sugiyono (2021), penelitian studi kasus adalah metode penelitian kualitatif yang mengkaji secara mendalam, rinci, dan komprehensif tentang suatu fenomena, peristiwa, individu, kelompok, atau organisasi dalam konteks kehidupan nyata. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data, dan penekanannya lebih pada pemahaman makna dari data yang diperoleh.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam tata kelola kelembagaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa dalam membangun opini publik pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2024. Melalui pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji fenomena kelembagaan dalam konteks nyata melalui sejenis informasi secara mendalam dari berbagai sumber data.

Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah fokus utama yang menjadi sasaran pengamatan, kajian, dan analisis dalam suatu penelitian. Dalam konteks penelitian ini, objek dalam penelitian ini berfokus pada tata kelola kelembagaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam membangun opini publik pada Pilkada 2024 di Kabupaten Sumbawa. Secara khusus, objek penelitian ini mencakup bagaimana aturan, nilai, serta praktik jurnalistik yang diterapkan oleh PWI mempengaruhi proses penyampaian informasi dan pembentukan opini publik di masyarakat.

Sementara subjek penelitian adalah pihak atau individu yang menjadi sumber utama data dalam penelitian. Penentuan subjek penelitian dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, informan penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola kelembagaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yaitu pengurus PWI Kabupaten Sumbawa, wartawan yang tergabung dalam organisasi PWI, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas jurnalistik dalam konteks Pilkada 2024 di Kabupaten Sumbawa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pertama, observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jurnalistik dilakukan, interaksi antar wartawan, serta dinamika yang terjadi dalam proses penyampaian informasi kepada publik selama Pilkada 2024. Melalui observasi, peneliti dapat memahami situasi secara nyata dan memperoleh data yang bersifat kontekstual.

Kedua, wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam dari berbagai perspektif yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara ini bersifat mendalam guna mengetahui pandangan, pengalaman, serta peran masing-masing responden dalam proses pembentukan opini publik. Wawancara dilakukan secara langsung dengan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa, Pemilik Media Liputan Sumbawa, dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa.

Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data dokumen dalam penelitian ini dapat berupa arsip

organisasi PWI, berita media, foto, video, rekaman suara, serta dokumen tertulis lainnya baik dalam bentuk soft file maupun hard file. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara, sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2019) yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, dan bagan agar data mudah dibaca dan dipahami. Sementara penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian dengan mengacu pada teori kelembagaan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang berbeda (Ketua dan Sekretaris PWI Kabupaten Sumbawa, Pemilik Media Liputan Sumbawa, dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa). Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memvalidasi temuan penelitian (Sugiyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam konteks penelitian ini, tata kelola kelembagaan PWI Kabupaten Sumbawa dianalisis menggunakan Teori Kelembagaan Baru (*New Institutional Theory*) yang menjelaskan bahwa suatu lembaga tidak hanya dibentuk oleh aturan formal, tetapi juga oleh norma sosial serta cara berpikir yang berkembang dalam lingkungan organisasi. Scott (2008) menyatakan bahwa kelembagaan terdiri dari tiga pilar utama, yaitu regulatif, normatif, dan kultural-kognitif yang secara bersama-sama memberikan stabilitas dan makna dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks penelitian ini, teori kelembagaan baru digunakan untuk menganalisis bagaimana Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa menjalankan perannya dalam membangun opini publik pada Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2024. Ketiga pilar tersebut menjadi dasar dalam memahami bagaimana aturan, nilai, serta cara berpikir wartawan memengaruhi praktik jurnalistik dan pembentukan opini publik di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh informasi berkaitan dengan implementasi tiga pilar kelembagaan, yaitu regulatif, normatif, dan kultural-kognitif yang diterapkan oleh PWI, serta bagaimana pengaruhnya terhadap pembentukan opini publik di tengah masyarakat.

1. Pilar Regulatif dalam Tata Kelola Kelembagaan PWI Kabupaten Sumbawa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kelembagaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa dalam membangun opini publik pada Pilkada Tahun 2024 didasarkan pada penerapan aturan formal yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik agar tetap independen, akurat, dan berimbang selama proses pemberitaan Pilkada. Ketua PWI Kabupaten Sumbawa menjelaskan bahwa organisasi secara rutin melakukan pembinaan kepada wartawan agar tetap mematuhi kode etik jurnalistik, terutama pada momentum Pilkada yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap

keberpihakan media. Pembinaan tersebut dilakukan melalui sosialisasi kode etik, komunikasi internal organisasi, serta dorongan kepada wartawan untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Temuan ini menunjukkan bahwa PWI berupaya menjalankan fungsi regulatif melalui pembentukan aturan sekaligus pembinaan terhadap anggotanya.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Tiyar Trisandy, SS selaku Pemilik Media Liputan Sumbawa. Beliau menjelaskan bahwa setiap informasi yang diterima redaksi tidak langsung dipublikasikan, tetapi terlebih dahulu dibahas dalam rapat redaksi dan aktivitas melalui proses investigasi lapangan maupun klarifikasi kepada pihak terkait. Menurutnya, media harus memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan memenuhi prinsip keberimbangan, akurasi, tidak mencampurkan fakta dengan opini, menjunjung asas praduga tidak bersalah, serta menolak praktik suap dalam kegiatan jurnalistik. Meskipun Media Liputan Sumbawa tidak tergabung menjadi anggota PWI, penerapan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan adanya kesamaan orientasi terhadap pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.

Selain itu Heri Kurniawansyah, S.AP., MPA, selaku Anggota KPU Kabupaten Sumbawa, menyatakan bahwa selama penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 pemberitaan media pada umumnya telah berjalan secara objektif dan tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu. Media dinilai menjadi mitra strategis KPU dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga keberadaannya sangat penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Menurutnya, media merupakan instrumen utama dalam membangun opini masyarakat terhadap proses demokrasi sehingga profesionalisme pers harus terus dijaga. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pilar regulatif telah berjalan melalui adanya aturan formal, mekanisme pembinaan, dan penerapan kode etik jurnalistik. Namun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh terbatasnya pengawasan organisasi serta konsistensi penerapan aturan di lapangan. Dengan demikian, tata kelola regulatif PWI Kabupaten Sumbawa telah memberikan dasar kelembagaan yang kuat, namun tetap memerlukan penguatan dalam aspek pengawasan agar mampu menjaga kualitas pemberitaan secara lebih optimal.

2. Pilar Normatif dalam Tata Kelola Kelembagaan PWI Kabupaten Sumbawa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kelembagaan PWI Kabupaten Sumbawa tidak hanya dibangun melalui aturan formal, tetapi juga melalui penanaman nilai-nilai profesionalisme, independensi, objektivitas, dan tanggung jawab sosial kepada wartawan. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman moral dalam menjalankan praktik jurnalistik, khususnya pada masa Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 yang memiliki dinamika politik cukup tinggi. Melalui pelatihan organisasi, sosialisasi Kode Etik Jurnalistik, serta dorongan untuk meningkatkan kompetensi jurnalis, PWI berupaya membangun budaya profesional yang mampu menjaga kualitas pemberitaan. Ketua PWI Kabupaten Sumbawa menjelaskan bahwa wartawan selalu diingatkan agar tetap menjaga independensi dan tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu. Menurutnya, pers mempunyai tanggung jawab besar karena setiap informasi yang dipublikasikan dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami dinamika politik daerah. Oleh karena itu, pemberitaan harus disusun secara objektif, berimbang, dan mengedepankan kepentingan publik dibandingkan kepentingan kelompok tertentu.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Tiyar Trisandy, SS , selaku Pemilik Media Liputan Sumbawa. Meskipun media yang dipimpinnya tidak tergabung dalam PWI, beliau menegaskan bahwa profesionalisme merupakan prinsip utama dalam proses produksi berita. Setiap informasi harus digali terlebih dahulu

melalui investigasi lapangan dan klarifikasi kepada pihak yang terkait sebelum dipublikasikan. Selain itu, wartawan dituntut untuk tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, menjunjung asas praduga tak bersalah, serta menolak segala bentuk praktik suap yang dapat mempengaruhi pemberitaan independensi. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai profesionalisme jurnalistik telah menjadi standar moral yang diterapkan tidak hanya oleh anggota PWI, tetapi juga oleh media lokal di Kabupaten Sumbawa.

Pandangan tersebut juga didukung oleh Heri Kurniawansyah, S.AP., MPA, selaku Anggota KPU Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, selama penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 media telah menjadi mitra strategis KPU dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pemberitaan media dinilai telah membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai seluruh tahapan Pilkada sehingga proses demokrasi dapat berlangsung secara terbuka. Ia juga menyampaikan bahwa secara umum wartawan telah menuliskan sesuai dengan etika jurnalistik, meskipun kritik terhadap penyelenggara pemilu tetap merupakan bagian dari fungsi kontrol media sosial yang dilakukan secara profesional dan berdasarkan fakta.

Dalam perspektif Teori Kelembagaan Baru, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pilar normatif bekerja melalui internalisasi nilai, norma, dan standar perilaku yang menjadi pedoman moral bagi wartawan. Scott menjelaskan bahwa pilar normatif tekanan kewajiban sosial, nilai profesional, dan perilaku yang dianggap tepat dalam suatu organisasi, bukan semata-mata kepatuhan terhadap aturan formal. Dengan demikian, profesionalisme jurnalis tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kode etik, tetapi juga oleh sejauh mana nilai-nilai tersebut dihayati dan diwujudkan dalam praktik jurnalistik sehari-hari. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Dalam praktiknya, wartawan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tuntutan kecepatan penyampaian informasi, persaingan antar media, serta dinamika politik lokal yang berpotensi mempengaruhi pemberitaan independensi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pilar normatif sangat bergantung pada komitmen individu wartawan dalam mempertahankan integritas profesinya.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa PWI Kabupaten Sumbawa telah berupaya membangun tata kelola kelembagaan melalui penguatan nilai profesionalisme, independensi, dan tanggung jawab sosial wartawan. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral yang mendukung kualitas pemberitaan selama Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2024. Namun demikian, penguatan pembinaan dan internalisasi etika jurnalistik tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan agar nilai-nilai profesional tersebut dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

3. Pilar Kultural-Kognitif dalam Tata Kelola Kelembagaan PWI Kabupaten Sumbawa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kelembagaan PWI Kabupaten Sumbawa tidak hanya dipengaruhi oleh aturan formal dan nilai-nilai profesional, tetapi juga oleh cara berpikir, pengalaman, serta budaya kerja wartawan dalam memaknai praktik jurnalistik. Dalam perspektif Teori Kelembagaan Baru, pilar kultural-kognitif menjelaskan bahwa perilaku individu dibentuk oleh pemahaman bersama, kebiasaan, dan cara memaknai realitas yang berkembang dalam lingkungan organisasi. Dengan demikian, praktik jurnalistik tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga oleh bagaimana wartawan memahami tawarannya sebagai penyedia informasi publik.

Berdasarkan hasil wawancara Ketua PWI Kabupaten Sumbawa memandang bahwa media mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses demokrasi. Dalam praktik pemberitaan Pilkada, wartawan tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga melakukan proses seleksi, verifikasi, dan penyusunan informasi sesuai dengan nilai dan kebutuhan publik. Cara pandang tersebut membentuk pola kerja yang secara terus-menerus menjadi budaya dalam aktivitas jurnalistik.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Tiyar Trisandy, SS, selaku Pemilik Media Liputan Sumbawa. Beliau menjelaskan bahwa setiap informasi yang diterima redaksi selalu dibahas terlebih dahulu melalui rapat redaksi sebelum dipublikasikan. Apabila terdapat informasi yang masih diragukan kebenarannya, media akan menugaskan wartawan untuk melakukan investigasi lapangan dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Menurutnya, kebiasaan tersebut telah menjadi budaya kerja redaksi agar setiap berita yang dipublikasikan memiliki tingkat akurasi dan keberimbangan yang tinggi. Walaupun Media Liputan Sumbawa tidak tergabung dalam PWI, budaya verifikasi dan kehati-hatian tersebut menunjukkan adanya kesadaran profesional dalam praktik jurnalistik.

Pandangan yang sama disampaikan oleh Heri Kurniawansyah, S.AP., MPA, selaku Anggota KPU Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, media telah menjadi instrumen utama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat selama penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dan para peserta Pilkada. Oleh karena itu, KPU memandang media sebagai mitra strategi yang berkontribusi dalam membangun opini publik melalui penyebaran informasi yang akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa cara wartawan memahami suatu peristiwa berpengaruh terhadap proses *framing* berita. Meskipun seluruh pers berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik, setiap media memiliki kebijakan redaksional dan sudut pandang yang berbeda dalam mengangkat suatu isu. Perbedaan tersebut menekankan penekanan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga realitas yang diterima publik merupakan hasil dari proses konstruksi sosial melalui aktivitas jurnalistik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan opini masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh isi informasi, tetapi juga oleh cara media membingkai suatu peristiwa. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa institusi jurnalistik dibentuk oleh aturan, norma, sekaligus rutinitas, keyakinan, dan praktik yang berkembang dalam organisasi media.

Salah satu contoh yang terlihat dalam penelitian ini adalah pemberitaan mengenai dugaan surat suara yang telah tercablos di TPS 06 Desa Juran Alas, Kecamatan Alas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa, isu tersebut tidak mengganggu substansi penyelenggaraan Pilkada karena KPU segera melakukan klarifikasi dan penyelesaian sesuai mekanisme hukum. Dari perspektif penyelenggara pemilu, pemberitaan media yang mengacu pada informasi resmi membantu masyarakat memperoleh pemahaman yang benar sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang lebih luas. Temuan ini menunjukkan bahwa verifikasi budaya yang diterapkan media memiliki kontribusi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Jika dijelaskan menggunakan Teori Kelembagaan Baru, pilar kultural-kognitif merupakan aspek yang paling dominan dalam membentuk praktik jurnalistik di Kabupaten Sumbawa. Kebiasaan melakukan verifikasi, diskusi budaya dalam rapat redaksi, pengalaman wartawan,

serta pemahaman bersama mengenai fungsi media telah membentuk pola kerja yang berlangsung secara berkelanjutan. Dengan kata lain, praktik jurnalistik tidak hanya dikendalikan oleh aturan formal maupun nilai profesional, tetapi juga oleh budaya organisasi yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari wartawan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kelembagaan PWI Kabupaten Sumbawa dalam membangun opini publik merupakan hasil interaksi antara pilar regulatif, normatif, dan kultural-kognitif. Namun demikian, pilar kultural-kognitif memiliki pengaruh yang relatif lebih kuat karena membentuk cara berpikir dan kebiasaan wartawan dalam menjalankan praktik jurnalistik. Oleh karena itu, penguatan tata kelola kelembagaan tidak hanya perlu dilakukan melalui penegakan aturan dan pembinaan profesi, tetapi juga melalui penguatan budaya organisasi yang mendukung independensi, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial wartawan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Pembahasan

Dari perspektif penyelenggara pemilu, media memiliki posisi yang sangat strategis sebagai mitra penyelenggara pemilu dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pada setiap tahapan Pilkada, KPU secara aktif menjalin kerja sama dengan media untuk menyampaikan informasi kepilwuan kepada publik. Selain itu, keberadaan media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang berperan dalam membentuk opini publik selama proses Pilkada. Media menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat sehingga dapat mendukung proses demokrasi yang berkualitas. Pandangan ini sejalan dengan prinsip Kode Etik Jurnalistik yang menekankan pentingnya independensi, akurasi, dan keberimbangan dalam pemberitaan.

Dalam konteks Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, tata kelola kelembagaan PWI memiliki posisi yang sangat strategis. Hal ini dikarenakan media massa sebagai produk dari aktivitas jurnalistik memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Informasi yang disampaikan oleh media tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian fakta, tetapi juga berperan dalam membongkar realitas sosial dan politik yang kemudian memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kandidat maupun dinamika Pilkada. Oleh karena itu, kualitas tata kelola kelembagaan PWI akan sangat menentukan arah pembentukan opini publik di tengah masyarakat.

Tata kelola kelembagaan secara umum dapat dipahami sebagai serangkaian proses yang terencana dan sistematis dalam mengatur, mengarahkan, serta mengendalikan perilaku organisasi dan aktor di dalamnya guna mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), tata kelola kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan aspek struktural dan administratif, tetapi juga mencakup aturan formal, nilai-nilai profesionalisme, serta cara berpikir yang berkembang di kalangan wartawan dalam menjalankan praktik jurnalistik.

Sebagai organisasi profesi, PWI tidak hanya berfungsi sebagai wadah bagi wartawan, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penegakan etika jurnalistik. Dalam menjalankan fungsi tersebut, PWI dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial media. Dengan demikian, tata kelola kelembagaan PWI tidak hanya berorientasi pada kepentingan internal organisasi, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan demokrasi di tingkat lokal, khususnya dalam momentum Pilkada.

Dalam konteks penelitian ini, tata kelola kelembagaan PWI Kabupaten Sumbawa dianalisis menggunakan Teori Kelembagaan Baru yang dikemukakan oleh Scott (2008), yang menekankan bahwa suatu kelembagaan dibangun oleh tiga pilar utama, yaitu pilar regulatif, pilar normatif, dan pilar kultural-kognitif. Ketiga pilar tersebut saling berinteraksi dalam membentuk perilaku organisasi serta praktik yang dilakukan oleh aktor di dalamnya. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana PWI berperan dalam membangun opini publik, diperlukan analisis yang tidak hanya melihat aspek aturan formal, tetapi juga nilai-nilai yang dianut serta cara berpikir yang berkembang dalam praktik jurnalistik.

Dengan demikian, pembahasan mengenai tata kelola kelembagaan PWI dalam membangun opini publik pada Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 difokuskan pada analisis tiga pilar kelembagaan, yaitu regulatif, normatif, dan kultural-kognitif. Analisis ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana masing-masing pilar tersebut diimplementasikan dalam praktik, serta bagaimana pengaruhnya terhadap pembentukan opini publik di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tata kelola kelembagaan PWI Kabupaten Sumbawa menunjukkan adanya upaya untuk menjalankan fungsi organisasi secara sistematis, baik melalui penyusunan aturan, pembinaan wartawan, maupun pengawasan terhadap praktik jurnalistik. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai dinamika dan tantangan yang memengaruhi efektivitas peran PWI dalam menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada publik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tata kelola kelembagaan PWI tidak hanya bergantung pada keberadaan struktur organisasi dan aturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana aturan tersebut dijalankan serta bagaimana aktor di dalamnya memahami dan menginternalisasi nilai-nilai profesionalisme dalam praktik jurnalistik. Jika dianalisis menggunakan Teori Kelembagaan Baru, tata kelola kelembagaan PWI Kabupaten Sumbawa dapat dipahami melalui tiga pilar utama, yaitu regulatif, normatif, dan kultural-kognitif. Ketiga pilar tersebut menunjukkan bahwa praktik jurnalistik tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh nilai serta cara berpikir yang berkembang dalam lingkungan sosial wartawan.

Pilar regulatif dalam tata kelola PWI terlihat dari adanya aturan formal seperti kode etik jurnalistik dan pedoman organisasi yang menjadi dasar dalam menjalankan aktivitas jurnalistik. Keberadaan aturan ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, PWI telah memiliki sistem yang jelas untuk mengatur perilaku anggotanya. Namun, dalam praktiknya, efektivitas aturan tersebut masih bergantung pada tingkat pengawasan serta konsistensi dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Sementara itu, pilar normatif tercermin dalam upaya PWI untuk membangun nilai-nilai profesionalisme melalui pembinaan wartawan, seperti pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan sosialisasi kode etik jurnalistik. Upaya ini menunjukkan bahwa PWI berusaha menanamkan nilai independensi, objektivitas, dan tanggung jawab sosial dalam diri wartawan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan adanya variasi dalam tingkat penerapan nilai-nilai tersebut, sehingga menunjukkan bahwa internalisasi norma belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Di sisi lain, pilar kultural-kognitif menjadi aspek yang sangat penting dalam memahami bagaimana opini publik terbentuk. Dalam konteks ini, wartawan tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang membingkai realitas melalui pemberitaan. Cara wartawan memahami suatu peristiwa akan memengaruhi bagaimana informasi tersebut disampaikan kepada publik, sehingga secara tidak langsung membentuk persepsi masyarakat terhadap dinamika Pilkada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola kelembagaan PWI Kabupaten

Sumbawa dalam membangun opini publik merupakan hasil dari interaksi antara aturan formal, nilai-nilai profesionalisme, serta cara berpikir wartawan dalam memahami realitas sosial. Ketiga aspek tersebut tidak selalu berjalan secara seimbang, sehingga memengaruhi kualitas praktik jurnalistik dan arah pembentukan opini publik.

Berdasarkan analisis terhadap tiga pilar dalam Teori Kelembagaan Baru, dapat disimpulkan bahwa praktik jurnalistik dalam PWI Kabupaten Sumbawa pada pemberitaan Pilkada Tahun 2024 dibentuk oleh interaksi antara aspek regulatif, normatif, dan kultural-kognitif. Pilar regulatif memberikan dasar aturan formal melalui kode etik jurnalistik, pilar normatif membentuk nilai dan etika profesi wartawan, sedangkan pilar kultural-kognitif memengaruhi cara wartawan memahami dan memaknai realitas sosial dalam pemberitaan.

Namun demikian, ketiga pilar tersebut belum berjalan secara seimbang. Pilar regulatif masih menghadapi keterbatasan dalam pengawasan dan penegakan aturan, pilar normatif belum sepenuhnya terinternalisasi dalam diri wartawan, sedangkan pilar kultural-kognitif justru menjadi faktor dominan yang membentuk praktik jurnalistik melalui kebiasaan dan cara berpikir yang berkembang di lingkungan media. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan kelembagaan PWI dalam menjaga kualitas pemberitaan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan dan nilai, tetapi juga pada bagaimana membentuk pola pikir dan budaya kerja wartawan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan yang tidak hanya bersifat struktural (aturan), tetapi juga kultural (pembentukan cara berpikir) agar praktik jurnalistik dapat berjalan secara profesional, independen, dan bertanggung jawab dalam mendukung proses demokrasi di Kabupaten Sumbawa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola kelembagaan PWI Kabupaten Sumbawa telah memberikan kontribusi positif dalam membangun opini publik selama Pilkada 2024 melalui pemberitaan yang objektif, akurat, dan berimbang. Tata kelola kelembagaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa dalam membangun opini publik pada Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 dilaksanakan melalui tiga pilar kelembagaan, yaitu pilar regulatif, normatif, dan kultural-kognitif. Pilar regulatif diwujudkan melalui penerapan Kode Etik Jurnalistik, pelatihan, serta pengawasan terhadap wartawan sebagai pedoman dalam menghasilkan pemberitaan yang objektif dan berimbang. Pilar normatif tercermin pada upaya penanaman nilai profesionalisme, independensi, integritas, dan tanggung jawab sosial dalam praktik jurnalistik. Sementara itu, pilar kultural-kognitif terlihat dari terbentuknya budaya kerja wartawan yang mengedepankan proses verifikasi, klarifikasi, serta pemaknaan terhadap peran media sebagai penyedia informasi publik dan pengawalan demokrasi. Ketiga pilar tersebut saling melengkapi dalam membentuk praktik jurnalistik yang profesional.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas tata kelola kelembagaan masih menghadapi tantangan berupa pembatasan pengawasan organisasi, belum meratanya internalisasi nilai profesionalisme pada seluruh wartawan, serta adanya pengaruh budaya kerja media dalam membentuk praktik pemberitaan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola kelembagaan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan sistem pengawasan, pembinaan profesional, dan penguatan budaya jurnalistik yang berorientasi pada independensi, akurasi, serta kepentingan publik agar media mampu terus mendukung kualitas demokrasi di tingkat lokal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai upaya peningkatan efektivitas pengawasan etika jurnalistik oleh PWI Kabupaten Sumbawa, yaitu sebagai berikut:

1. PWI Kabupaten Sumbawa perlu mengembangkan sistem pengawasan yang lebih terstruktur melalui monitoring rutin yang terjadwal dan berkelanjutan. Dengan adanya sistem yang lebih sistematis, potensi pelanggaran etika dapat dideteksi lebih dini dan dicegah sebelum berkembang lebih jauh.
2. PWI diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dengan lembaga lain, seperti Dewan Pers, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat, dalam upaya menjaga kualitas informasi publik. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem media yang sehat dan mendukung demokrasi yang berkualitas.
3. Dalam menghadapi era digital, PWI perlu mengembangkan strategi pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan media online dan media sosial. Hal ini penting mengingat tantangan utama jurnalistik saat ini tidak hanya berasal dari media konvensional, tetapi juga dari arus informasi digital yang sangat cepat dan kompleks.

Dengan adanya penguatan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan PWI Kabupaten Sumbawa dapat menjalankan fungsi pengawasan etika jurnalistik secara lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu menjaga profesionalisme wartawan serta mendukung terciptanya opini publik yang sehat dalam proses demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D. P., & Adi, L. J. (2023). Analisis Praktik Citizen Journalism pada Akun Twitter Merapi Uncover dalam Menerapkan Kode Etik Jurnalistik. (2023). *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 5(2), 272-287.
- Ahrne, G., & Brunsson, N. (2019). Organization Outside Organizations: The Significance of Partial Organization. *Organisasi*, 26(1), 83-104.
- Amisan, P., Pioh, N. R., & Pangemanan, F. N. (2024). Peran Lembaga Penyiaran Sebagai Sarana Komunikasi Politik dalam Pilkada Sulawesi Utara Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19. *Academy of Education Journal*, 15(2), 1337-1346.
- Bayani, N., & Fazri, A. (2022). Peran Organisasi Wartawan dalam Meningkatkan Profesionalisme Wartawan (Studi Kasus Persatuan Wartawan Indonesia Aceh Jaya). *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 1(2), 187-192.
- Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th Ed)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023). Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 51-75.
- Hanafi. (2019). Membangun Opini Publik Terhadap Partai Politik (Studi Kasus Pilkada Jabar 2018). *ArtComm: Jurnal Komunikasi dan Desain*, 2(1), 15-21.

- Kadir, A., Usman, A., & Imam, S. (2024). Eksaminasi Peran Media Lokal dalam Komunikasi Politik Pilkada Serentak 2024: Studi Kasus di Kota Bima. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(2), 29-42.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th Ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Misroji. (2016). Kode Etik Jurnalistik Sebagai Pedoman Etik Wartawan. *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 8(2), 1-9.
- Moleong, L.J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 40)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Zalzillah, L. N., & Gumelar, R. G. (2024). Kontribusi Media Digital dalam Membangun Opini Publik Pemilu 2024 (Studi Kasus Narasi Newsroom). *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 6(1), 49-60.
- Pangaribuan, C. H., Ramadhana, W., & Rizki R. (2024). Netralisasi Pers dalam Menyikapi Pemilu 2024 Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Etika Profesi. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1-18.
- Renwarin, S. (2024). Peran Media Sosial Dalam Membentuk Opini Publik Selama Pilkada 2024 di Kabupaten Merauke. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 4(1), 32-40.
- Rianto, P. (2011). Opini Publik, Agenda Setting, dan Kebijakan Publik. *Jurnal Komunikasi*, 5(1), 31-40.
- Rinaldi, Delmenda, M. A., & Marta, R. (2024). Polarisasi dan Pembentukan Opini Publik di Media Sosial Selama Pilkada Sumatera Barat (SUMBAR) 2024. *CARAKA: Indonesia Journal of Communication*, 5(2), 205-214.
- Sari, F. N. I., & Andiyansari, P. (2022). Pengaruh Tingkat Pemahaman Kode Etik Jurnalistik terhadap Profesionalisme Wartawan Media Online di Provinsi DI Yogyakarta. *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media dan Cinema*, 6(1), 1-11.
- Scott, WR (2008). *Institutions and Organizations: Ideas and Interests (3rd Edition)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Thariq, M. (2018). Profesionalisme Jurnalis Lokal dalam Peliputan Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study*, 4(2), 95-111.